



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 29 OKTOBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI



PANEN: Kepala SMPN 1 Tulangan Yyuk Dian Mandasari (kiri) bersama Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali (dua dari kiri) dan Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Ridho Prasetyo (dua dari kanan) mengambil sawi di kebun sekolah.

SMPN 1 Tulangan Ajak Siswa Peduli Lingkungan lewat Lentera Semar

SIDOARJO – Kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup hanya diajarkan lewat teori di dalam kelas. Siswa juga perlu terlibat langsung dalam merawat alam dan mengelola lingkungan. Semangat itulah yang dikembangkan SMPN 1 Tulangan (Spentula) melalui program Lentera Semar (Lahan Edukatif Nyata Terawat Spentula Menghijau Asri).

Program tersebut menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan Galaksi Spentula 2024 yang digelar kemari

(28/10). Dalam kegiatan itu, sekolah memanen hasil kebun siswa, meresmikan program Semesta Spentula (Semarak Penampilan Seni dan Talenta Anak Spentula) dan meluncurkan buku antologi karya guru berjudul Setapak Kisah Sejuta Inspirasi.

Kepala SMPN 1 Tulangan Yyuk Dian Mandasari menjelaskan program Lentera Semar menjadi kelanjutan Gerak Melati dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo. Melalui program tersebut, siswa ti-

dak hanya belajar menanam, tetapi juga terlibat dalam perawatan tanaman dan pengelolaan lingkungan sekolah. "Hasilnya mulai terlihat dari sejumlah tanaman yang sudah bisa dipanen, seperti pakcoy atau sawi, cabai, dan tomat," katanya.

Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Ridho Prasetyo yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi langkah SMPN 1 Tulangan. Menurut dia, kegiatan semacam itu dapat melatih tanggung jawab siswa sejak dini, mulai

dari mengolah lahan hingga merawat tanaman dan menikmati hasil panen. "Anak-anak mulai diberikan tanggung jawab sejak dini, mulai mengolah lahan, merawat tanaman, hingga menghasilkan sesuatu saat panen," ujarnya.

Ridho berharap, hasil kebun sekolah tidak hanya berhenti pada kegiatan panen. Tanaman yang dihasilkan bisa diolah lebih lanjut menjadi produk bermanfaat, bahkan memiliki nilai ekonomi. (eza/hen)

Bupati Tekankan Pengawasan Internal Harus Beri Solusi, Bukan Cari Kesalahan

KOTA—Pengawasan pemerintahan bukan sekedar mencari kesalahan, melainkan memastikan potensi penyimpangan dapat diungkap sejak dini dan kelemahan tata kelola segera diperbaiki. Pesan itu ditegaskan Bupati Sidoarjo Subandi saat mendorong peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pelatihan hukum pidana bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (K-AGRI) RI.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 27-30 Oktober 2026, tersebut diikuti 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Inspek-

torat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Pemkab Sidoarjo dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI untuk memperkuat kapasitas pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subandi mengatakan, pemahaman hukum menjadi bekal penting bagi APIP dalam menjalankan tugas pengawasan secara tepat. "Terutama untuk membedakan persoalan administratif yang tidak dapat ditindaklanjuti melalui pemerintahan dan perbaikan sistem dengan dugaan tindak pidana yang harus ditin-

dakanjuti sesuai ketentuan hukum.

Menurut dia, pengawasan internal harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga mendorong perbaikan agar penyimpangan tidak kembali terjadi.

"Pengawasan internal harus berorientasi pada pencegahan, penyimpangan dan perbaikan tata kelola. Jangan hanya mencari kesalahan tetapi bagaimana mencegah penyimpangan sejak dini dan memperbaiki kelemahan sistem," ujar Subandi, Rabu (28/10).

Dia berharap, pelatihan tersebut dimanfaatkan peserta untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan kapasitas dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan begitu, pengawasan dapat berjalan efektif sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai aturan. Sementara itu, Kepala Badiklat Kejaksaan RI Hari Sirag mengemukakan, pelatihan kapasitas APIP merupakan keharusan bagi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. (dik/vga)



PENGAWASAR: Peribab Sidoarjo gardeng Kajarung RI Rinkelhet pengawasan internal.

Gapura Jengjala Bakal Jadi Penanda Masuk Kota Delta

SIDOARJO—Pintu masuk Sidoarjo bakal memiliki penanda baru yang meng- angkat sejarah lokal. Pemkab Sidoarjo berencana membangun gapura bernama Jengjala di kawasan perbatasan dengan Surabaya. Selain mempercantik wajah Kota Delta, gapura tersebut akan memperkuat identitas daerah

yang dikenal masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mul-yono mengatakan, nama Jengjala dipilih karena memiliki kaitan dengan sejarah Sidoarjo.

"Kami ingin nama itu juga dikenal masyarakat karena Jengjala menjadi bagian dari sejarah daerah ini," ka-

tanya kemarin (28/10). Gapura itu direncanakan berdiri di perbatasan Kecamatan Gayungan, Surabaya, dengan Kecamatan Waru, Sidoarjo. Berdasarkan rancangan awal, gapura akan memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan tinggi sekitar 7-8 meter. Namun, ukuran masih dapat berubah menyesuaikan kondisi.

Penataan kawasan perbatasan direncanakan berlangsung secara bertahap, termasuk di wilayah perbatasan Sidoarjo dengan Pasuruan dan Mojokerto. Arif berharap, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi jalur lalu lintas, tetapi juga memiliki ciri khas yang mudah dikenali. (fui/hen)

TEKENER: Gapura Jengjala setinggi 8 meter akan dibangun di perbatasan Sidoarjo-Surabaya.



CS Diunduh dengan...

KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

Daftar Calon Jemaah Haji 2027 Ditetapkan

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan daftar nama calon jemaah haji (CJH) reguler yang berhak melunasi biaya haji dan masuk dalam kuota penyelenggaraan haji 2027. Kemenhaj mengingatkan para CJH yang namanya tercantum dalam daftar tersebut untuk menjalani tes kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, mereka dapat melakukan pelunasan biaya haji.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyawan mengungkapkan, alokasi kuota reguler musim haji 2027 mencakup tiga kelompok utama, yakni jemaah yang menunda keberangkatan meski telah melunasi biaya haji, jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta jemaah lanjut usia yang mendapatkan prioritas.

Sebelum melangkah ke tahap pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), seluruh jemaah yang terdaftar diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan. Menurut Ian, penetapan syarat istithaah kesehatan menjadi kriteria mutlak yang menentukan kelayakan jemaah sebelum menyelesaikan kewajiban finansialnya.

"Jemaah dapat memeriksa status masing-masing melalui laman resmi Kemenhaj," katanya di Jakarta (28/10). Pengecekan status keberangkatan dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi Kemenhaj. Ian juga mengimbau jemaah untuk segera menjalani tes di fasilitas kesehatan yang berwenang sesuai prosedur pemerintah agar proses penetapan istithaah berjalan lancar.

ATURAN PELUNASAN BIAYA HAJI REGULER

- 1 Wajib dinyatakan istithaah kesehatan. Diawali dengan proses pemeriksaan kesehatan. Sampai keluar surat keterangan istithaah atau mampu secara kesehatan.
- 2 Wajib masuk dalam nomor porsi pemberangkatan tahun berjalan.
- 3 Melakukan pelunasan sesuai dengan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditetapkan pemerintah.
- 4 Besaran Bipih berbeda tiap embarkasi. Untuk musim haji 2027, besaran Bipih per embarkasi belum dikeluarkan.
- 5 Pelunasan dilakukan di Bank Penerima Setoran (BPS) saat pendaftaran haji.
- 6 Jadwal pelunasan biaya haji belum dikeluarkan Kemenhaj.

Sumber: Kemenhaj

GRAFIS: HERLAMBAH/JAWA POS

Kami mengimbau jemaah agar mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi administrasi, termasuk dana pelunasan, maupun kesehatan."



Ian Heriyawan
Dirjen
Pelayanan Haji
Kemenhaj

Ian menegaskan bahwa masa pelunasan biaya haji belum dibuka karena masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres) tentang biaya haji 2027.

"Kami mengimbau jemaah agar mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi administrasi, termasuk dana pelunasan, maupun kesehatan," kata Ian.

Dia juga mengingatkan CJH dengan nomor porsi keberangkatan aktif untuk berkomunikasi dengan kantor Kemenhaj setempat demi kelancaran seluruh tahapan haji tahun depan.

Di bagian lain, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

mengimbau diaspora Indonesia di berbagai negara untuk mendaftar haji sejak usia muda. Imbauan tersebut, antara lain, disampaikan kepada diaspora Indonesia yang berada di Malaysia. Pesan itu disampaikan di sela-sela kegiatan Kuala Lumpur Hajj Lifestyle Festival 2026 pada 24-25 Oktober 2026 di Malaysia.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan sosialisasi pendaftaran haji sejak usia muda sangat penting. Sebab, WNI atau diaspora yang menetap di Malaysia tidak dapat menggunakan kuota haji pemerintah setempat. Mereka tetap diwajibkan mendaftar melalui kuota Pemerintah Indonesia.

Dia menegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan persiapan finansial menjadi kebutuhan mendesak bagi ekspatriat, pekerja migran, hingga mahasiswa perantauan. Harry juga menekankan pentingnya persiapan yang menyeluruh bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri.

"BPKH ingin mendorong diaspora Indonesia agar tidak menunda persiapan ibadah haji," katanya. (wan/ali)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TETENGER:
Gapura
Jenggala
setinggi 8
meter akan
dibangun di
perbatasan
Sidoarjo-
Surabaya.



CS Dipindai dengan CamScanner

Gapura Jenggala Bakal Jadi Penanda Masuk Kota Delta

SIDOARJO – Pintu masuk Sidoarjo bakal memiliki penanda baru yang mengangkat sejarah lokal. Pemkab Sidoarjo berencana membangun gapura bernama Jenggala di kawasan perbatasan dengan Surabaya. Selain mempercantik wajah Kota Delta, gapura tersebut juga akan memperkuat identitas daerah yang dikenal masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan, nama Jenggala dipilih karena memiliki kaitan dengan sejarah Sidoarjo.

"Kami ingin nama itu juga dikenal masyarakat karena Jenggala menjadi bagian dari sejarah daerah ini," katanya kemarin (28/10).

Gapura itu direncanakan berdiri di perbatasan Kecamatan Gayungan, Surabaya, dengan Kecamatan Waru, Sidoarjo. Berdasarkan rancangan awal, gapura akan memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan tinggi sekitar 7-8 meter. Namun, ukuran masih dapat berubah menyesuaikan kondisi.

Penataan kawasan perbatasan direncanakan berlangsung secara bertahap, termasuk di wilayah perbatasan Sidoarjo dengan Pasuruan dan Mojokerto. Arif berharap, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi jalur lalu lintas, tetapi juga memiliki ciri khas yang mudah dikenali. (ful/hen)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

PANEN: Kepala SMPN 1 Tulangan Yayuk Dian Mandasari (kiri) bersama Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali (dua dari kiri) dan Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Ridho Prasetyo (dua dari kanan) mengambil sawi di kebun sekolah.

SMPN 1 Tulangan Ajak Siswa Peduli Lingkungan lewat Lentera Semar

SIDOARJO – Kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup hanya diajarkan lewat teori di dalam kelas. Siswa juga perlu terlibat langsung dalam merawat alam dan mengelola lingkungan. Semangat itulah yang dikembangkan SMPN 1 Tulangan (Spentula) melalui program Lentera Semar (Lahan Edukatif Nyata Terawat Spentula Menghijau Asri).

Program tersebut menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan Galaksi Spentula 2023 yang digelar kemarin

(28/10). Dalam kegiatan itu, sekolah memanen hasil kebun siswa, meresmikan program Semesta Spentula (Semarak Penampilan Seni dan Talenta Anak Spentula) dan meluncurkan buku antologi karya guru berjudul Setapak Kisah Sejuta Inspirasi.

Kepala SMPN 1 Tulangan Yayuk Dian Mandasari menjelaskan program Lentera Semar menjadi kelanjutan Gerak Melati dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo. Melalui program tersebut, siswa ti-

dak hanya belajar menanam, tetapi juga terlibat dalam perawatan tanaman dan pengelolaan lingkungan sekolah. "Hasilnya mulai terlihat dari sejumlah tanaman yang sudah bisa dipanen, seperti pakcoy atau sawi, cabai, dan tomat," katanya.

Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Ridho Prasetyo yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi langkah SMPN 1 Tulangan. Menurut dia, kegiatan semacam itu dapat melatih tanggung jawab siswa sejak dini, mulai

dari mengolah lahan hingga merawat tanaman dan menikmati hasil panen. "Anak-anak mulai diberikan tanggung jawab sejak dini, mulai mengolah lahan, merawat tanaman, hingga menghasilkan sesuatu saat panen," ujarnya.

Ridho berharap, hasil kebun sekolah tidak hanya berhenti pada kegiatan panen. Tanaman yang dihasilkan bisa diolah lebih lanjut menjadi produk bermanfaat, bahkan memiliki nilai ekonomi. (eza/hen)

Jawa Pos

Bupati Sidoarjo Salurkan Santunan Rp 46,3 Juta, Ahli Waris Kades Tropodo Waru Terima Tiga Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

SIDOARJO-Keluarga almarhum Kepala Desa (Kades) Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Moch Kusaini, menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan dengan total Rp 46.386.497 setelah yang bersangkutan meninggal dunia karena sakit.

Alhamdulillah, hari ini kita menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Kepala Desa Tropodo. Kami terus berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar perlindungan ini bisa dirasakan lebih luas, mulai perangkat desa, lembaga desa, hingga kader,"

Subandi
Bupati Sidoarjo

Santunan tersebut terdiri atas Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 42 juta, Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 2.869.982, serta Jaminan Pensiun (JP) Rp 1.516.515. Adanya tiga manfaat tersebut menjadi bukti pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan.

Penyerahan santunan dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo Arie Fianto Syofian, kepada istri almarhum di kediamannya di Jalan Flamboyant, Perum Wisma Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Rabu (28/10) siang.

Subandi menegaskan, Pemkab Sidoarjo terus berupaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya kepala desa, kepesertaan juga diperluas kepada perangkat desa, lembaga desa, hingga kader.

"Alhamdulillah, hari ini kita menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Kepala Desa Tropodo. Kami terus berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar



PEDULI: Bupati Sidoarjo Subandi (tengah) didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo Arie Fianto Syofian (kanan) serahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 46,3 juta kepada ahli waris Kades Tropodo, Waru, Rabu (28/10) siang.

perlindungan ini bisa dirasakan lebih luas, mulai perangkat desa, lembaga desa, hingga kader," ujarnya.

Menurut Subandi, upaya memperluas perlindungan sosial juga akan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Melalui program kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, setiap ASN ditargetkan dapat membantu satu warga dhuafa pada 2027.

Pada 2026, program tersebut mulai digerakkan dengan menyasar pejabat eselon II dan III, kepala sekolah, kepala puskesmas, serta kepala

rumah sakit.

"Harapan kami, seluruh jajaran pemerintah daerah ikut bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama warga yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial," katanya.

Subandi juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Sidoarjo mengalami penurunan. Namun, dia belum merinci data periode maupun indikator yang menjadi dasar penurunan tersebut.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Si-

doarjo Arie Fianto Syofian menjelaskan, santunan yang diterima keluarga almarhum tidak hanya berasal dari program Jaminan Kematian. Kepesertaan dalam program JHT dan JP turut memberikan manfaat tambahan bagi ahli waris.

Dia menyebut, sebelumnya perlindungan bagi kepala desa umumnya mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pada 2026, perlindungan tersebut diperluas dengan penambahan program JHT dan JP.

"Karena almarhum juga terdaftar dalam program JHT dan pensiun, ahli

waris tidak hanya menerima santunan kematian, tetapi juga manfaat dari kedua program tersebut," jelasnya.

Arie menambahkan, besaran santunan JKM untuk peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja ditetapkan sebesar Rp 42 juta, sepanjang memenuhi ketentuan kepesertaan.

"Yang terpenting, peserta terdaftar dan memenuhi ketentuan pembayaran iuran. Dengan perlindungan ini, keluarga yang ditinggalkan diharapkan memiliki jaminan finansial ketika terjadi risiko kematian," tandasnya. (dlk/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Tekankan Pengawasan Internal Harus Beri Solusi, Bukan Cari Kesalahan

KOTA-Pengawasan pemerintahan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini dan kelemahan tata kelola segera diperbaiki. Pesan itu ditegaskan Bupati Sidoarjo Subandi saat mendorong peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pelatihan hukum pidana bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan RI).

Pelatihan yang berlangsung selama lima hari, 30 Oktober 2026, tersebut diikuti 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Inspek-

torat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Pemkab Sidoarjo dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI untuk memperkuat kapasitas pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subandi mengatakan, pemahaman hukum menjadi bekal penting bagi APIP dalam menjalankan tugas pengawasan secara tepat.

Terutama untuk membedakan persoalan administratif yang harus ditin-

dakkanjuti sesuai ketentuan hukum.

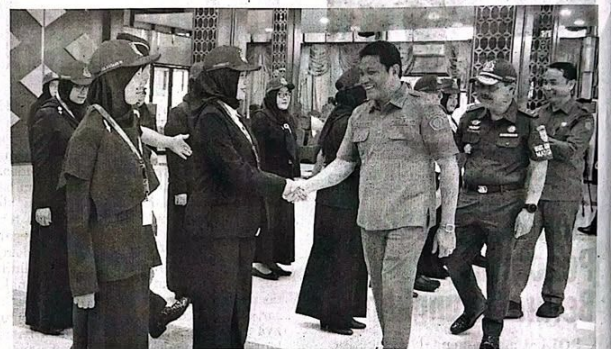
Menurut dia, pengawasan internal harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga mendorong perbaikan agar penyimpangan tidak kembali terjadi.

"Pengawasan internal harus berorientasi pada pencegahan penyimpangan dan perbaikan tata kelola. Jangan hanya mencari kesalahan, tetapi bagaimana mencegah penyimpangan sejak dini dan memperbaiki kelemahan sistem," ujar Subandi, Rabu (28/10).

Dia berharap, pelatihan tersebut dimanfaatkan peserta untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan kapasitas dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan begitu, pengawasan dapat berjalan efektif sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai aturan.

Sementara itu, Kepala Badiklat Kejaksaan RI Harli Siregar menegaskan, peningkatan kapasitas APIP merupakan kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. (dik/vga)



PENGAWASAN: Pemkab Sidoarjo gandeng Kejaksaan RI tingkatkan pengawasan internal.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PENCEGAHAN: Personel Satbinmas Polresta Sidoarjo saat memberi sosialisasi pencegahan paham radikalisme.

Polresta Sosialisasikan Pencegahan Radikalisme, Sasar Lingkungan Pendidikan

KOTA-Polresta Sidoarjo memperkuat upaya pencegahan paham radikalisme melalui edukasi dan pembinaan masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui sarasehan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta

Wibawa.

Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kopol Inggit Prasetyanto bersama Kasat Intelkam Kopol Moh. Arobi hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. "Kami memberikan pemahaman mengenai bahaya radikalisme serta pentingnya memperkuat wawasan kebangsaan,

toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat," ujar Kopol Inggit.

Dalam pemaparannya, Kopol Inggit Prasetyanto menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mencegah penyebaran paham radikalisme, terutama di kalangan

● Ke Halaman 10



Polresta Sosialisasikan...

generasi muda. "Penguatan karakter, penanaman nilai-nilai kebhinekaan, dan pembiasaan sikap toleran menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan terhadap pengaruh paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan," ujar Kopol Inggit.

Inggit menambahkan upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersa-

ma-sama dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. "Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghormati serta menjaga persatuan," imbuhnya.

Sementara itu, Kopol Moh. Arobi menambahkan materi mengenai kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikalisme melalui media sosial dan ruang digital. Masyarakat diimbau

untuk lebih kritis dalam menerima informasi, tidak mudah terprovokasi oleh konten bermuatan ujaran kebencian, serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sarasehan yang melibatkan unsur penerima di daerah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di Kabupaten Sidoarjo. Edu-

kasi secara berkelanjutan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan bangsa.

Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kopol Inggit Prasetyanto menegaskan, kepolisian berkomitmen mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan kerja sama lintas sektor.

"Polresta Sidoarjo berkomitmen untuk terus mengedepankan langkah pre-

ventif melalui edukasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif," kata Inggit.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham radikalisme sekaligus mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, toleran, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (sur/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Makna Sumpah Pemuda Orang Tua Memiliki Arti Penting Dalam Mendampingi Anak Muda

2 menit membaca

View : 3

admin

PENDIDIKAN - 29 Okt 2026



pena-indonesia.com – Sidoarjo. Peringatan hari Sumpah Pemuda memiliki makna tersendiri bagi Kusumo Adi Nugroho Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi PDIP, mengingat dengan terjadi anak muda di Sidoarjo yang menjadi korban radikalisme. Di tengah berkembangnya teknologi yang begitu pesat, sebanyak 23 anak muda di Sidoarjo menjadi korban radikalisme.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Cegah Radikalisme Remaja, Anggota DPRD Sidoarjo Minta Orang Tua Jadi Benteng Utama



Siska Prestiwati
28 Oct 2026 18:02

TERUPDATE PEMERINTAHAN POLITIK 0 18

1 MINUTES READING



filter: 0; jpegRotation: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:lfacing:0; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modelInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 0.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

